

Analisis Pelaksanaan Monev Mutu Sebagai Alat Ukur SOP pada Unit Pengelola Perguruan Tinggi Berbasis Islam di Kota Medan

Dedi Amrizal,¹ & Yusriati²

Email: dediamrizal@umsu.ac.id & yusriati@umsu.ac.id

RINGKASAN - Budaya mutu merupakan tujuan akhir dari setiap perguruan tinggi yang serius menerapkan penjaminan mutu. Hal itu tidak akan terwujud bila sebuah perguruan tinggi melalaikan proses monitoring dan evaluasi mutu (monev mutu) di tingkat fakultas dan prodi serta lembaga. Monev mutu pada beberapa perguruan tinggi berbasis Islam di kota Medan tidak berjalan bagus dan jarang ditindaklanjuti dengan benar. Padahal inilah alat ukur penting pelaksanaan SOP dengan benar di tingkat fakultas dan prodi serta lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pelaksanaan monev mutu fakultas dan prodi serta lembaga di perguruan tinggi berbasis Islam; (2) mengetahui kendala melakukan monev mutu ; (3) mengetahui proses tindak lanjut dari kegiatan monev mutu di tingkat fakultas dan prodi serta lembaga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk membuktikan bahwa pelaksanaan monev mutu di tingkat fakultas dan prodi serta lembaga telah berjalan atau tidak, melalui metode ini juga akan dianalisis mengapa upaya tindak lanjut tidak dijalankan dengan baik. Hasil penelitian mengungkapkan pelaksanaan monev mutu di tingkat fakultas dan prodi serta lembaga perguruan tinggi berbasis Islam di kota Medan berjalan hanya untuk memenuhi tuntutan pelaksanaan akreditasi dari Dikti. Hal ini dapat dibuktikan dengan upaya tindak lanjutnya yang tidak dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pengembangan SOP dan Standar Mutu tidak terlihat dengan baik.

Kata Kunci: *Monitoring Mutu, Evaluasi Mutu, Perguruan Tinggi.*

¹ Dosen Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

² Prodi Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

PENDAHULUAN

PDCA dan PPEPP adalah singkatan yang menunjukkan pelaksanaan sebuah siklus penjaminan mutu. Istilah Check (C) dan Evaluasi (E) menunjukkan kepada fungsi pengawasan dalam fungsi manajemen/ administrasi. Aktivitas pengawasan ini dalam pelaksanaan penjaminan mutu dikenal dengan istilah monitoring dan evaluasi (monev) dan audit mutu. Monev dijalankan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan SOP di fakultas dan prodi serta lembaga sedangkan audit dilakukan untuk mengukur keberhasilan Standar Mutu yang telah disahkan sebuah perguruan tinggi.

Pelaksanaan monev mutu di beberapa perguruan tinggi berbasis Islam yang terakreditasi C dan B belum berjalan sesuai dengan peruntukannya. Monev mutu yang dijalankan hanya dianggap kewajiban pelengkap borang akreditasi prodi dan fakultas saja. Padahal peranan sebuah monev mutu sangatlah penting dan menentukan bagi perjalanan mutu sebuah perguruan tinggi mulai dari tingkat fakultas sampai dengan prodi.

Selama ini, monev mutu yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi yang berbasiskan Islam selain hanya berfungsi untuk menutupi kebutuhan borang akreditasi yang dilakukan Dikti, upaya tindak lanjutnya pun tidak dikerjakan dan diambil manfaatnya.

Kita mengetahui bahwa pelaksanaan monev mutu bukan merupakan hal yang mudah dan murah bagi beberapa perguruan tinggi berbasis Islam yang telah terakreditasi C dan B. Namun biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan monev mutu yang besar itu ternyata dapat menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah siklus mutu yang berdampak pada perkembangan budaya mutu.

Sebuah monev mutu bila tidak dijalankan dengan rutin dan benar akan terlihat dari upaya tindak lanjut yang dikerjakan setelah monev mutu dilakukan. Sebagian terbukti telah menjalankan upaya tindak lanjut tetapi hanya sebatas keperluan akreditasi borang fakultas dan borang prodi saja.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah pelaksanaan monev mutu fakultas dan prodi serta lembaga di perguruan tinggi berbasis Islam; (2) apa saja kendala pelaksanaan monev mutu ; (3) bagaimana

proses tindak lanjut dari kegiatan monev mutu di tingkat fakultas dan prodi serta lembaga.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pelaksanaan monev mutu fakultas dan prodi serta lembaga di perguruan tinggi berbasis Islam; (2) mengetahui kendala melakukan monev mutu; (3) mengetahui proses tindak lanjut dari kegiatan monev mutu di tingkat fakultas dan prodi serta lembaga.

Pelaksanaan monev mutu berjalan diikuti dengan upaya tindak lanjut monev mutu. Aktivitas SPMI dinilai telah efektif dan sempurna bila dokumen penjaminan mutunya telah berjalan dan dimonev serta ditindaklanjuti dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk membuktikan bahwa pelaksanaan monev mutu di tingkat fakultas dan prodi serta lembaga telah berjalan atau tidak, melalui metode ini juga akan dianalisis mengapa upaya tindak lanjut tidak dijalankan dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Monev mutu adalah kegiatan evaluasi tingkat kinerja dari sebuah kebijakan, sekaligus secara sistematis menginvestigasi efektivitas sebuah program, menilai kontribusi program terhadap perubahan (goal/objektif) dan menilai kebutuhan perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekomendasi). Menurut Arikunto (2015) istilah evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan sudah tercapai. Hal ini dikuatkan oleh Anastasi dalam Hergenhahn dan Matthew (2012) bahwa evaluasi sebagai (*a systematic process of determining the extent to which instructional objectives are achieved by pupils*) evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan atas tujuan.

Tujuan dari pelaksanaan monev mutu adalah untuk menentukan tingkat kinerja dari pelaksanaan sebuah kebijakan (derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan), mengukur tingkat efisiensi dari pelaksanaan sebuah kebijakan (berapa biaya dan manfaat sebuah kebijakan), mengukur tingkat keluaran (mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau *output* sebuah kebijakan), mengukur

dampak sebuah kebijakan (melihat dampak positif maupun negative sebuah kebijakan), untuk mengetahui apabila ada penyimpangan (untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target), sebagai masukan (*input*) suatu kebijakan yang akan datang (untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik). Hal ini berarti tindakan evaluasi diperlukan oleh sebuah organisasi yang fokus pada tujuannya.

Sebuah hasil evaluasi tentunya akan menjadi informasi berharga dalam pengambilan keputusan pimpinan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Rostiah dalam Slameto (2012) yang mengatakan bahwa evaluasi adalah proses memahami atau memberi arti mendapatkan dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi petunjuk pihak-pihak pengambilan keputusan.

Berarti sebuah evaluasi wajib untuk ditindaklanjuti dan diambil tindakan terhadap temuan yang diperoleh demi kemajuan dimasa yang akan datang. Kurang tepatnya pelaksanaan monev serta tidak seriusnya untuk menindaklanjuti temuan monev mutu akan membuat sebuah perguruan tinggi sulit untuk mencapai tingkat akreditasi tertinggi yang diharapkan oleh dikti. Karena Dikti menjadikan tahapan check dan evaluasi penjaminan mutu sebagai instrument pengukur keberhasilan penerapan penjaminan mutu di suatu perguruan tinggi. Bila tahapan ini tidak berjalan sempurna, maka tidak mungkin penjaminan mutu terlaksana dengan baik, atau dengan kata lain budaya mutu akan sangat jauh dari kata terwujud.

Diantara alat ukur yang dapat dipakai dalam memantau keberadaan monev mutu di beberapa universitas berbasis Islam di Kota Medan adalah doing (apakah dilakukan secara rutin), efektivitas (apakah hasil yang diinginkan telah tercapai), kecukupan (seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah), pemerataan (apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok organisasi berbeda), responsivitas (apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka, ketepatan (apakah hasil yang dicapai bermanfaat).

Pada dasarnya keberadaan dan tindak lanjut aktivitas monev mutu di beberapa universitas berbasis Islam yang terakreditasi C dan B di kota Medan

belum dapat mengukur kinerja organisasi. Disamping itu, pelaksanaannya pun harus nyata dan berkelanjutan tidak tergantung dengan aktivitas akreditasi prodi dan perguruan tinggi semata.

Kebermaknaan sebuah aktivitas biasanya terlihat dari setiap aspek tindak lanjut yang diberikan setelah itu. Monev mutu akan membutuhkan tindak lanjut sebagai wujud keberhasilan sebuah aktivitas. Tindak lanjut monev mutu dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan teori, pelaksanaan, dan manfaat serta metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan evaluasi akademik dan evaluasi non akademik yang dilakukan selama ini menggunakan: metode dokumentasi (dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan tahunan/ semesteran/ bulanan/ borang akreditasi), metode survei (tujuannya untuk menjaring data dari para *stakeholders*, terutama kelompok sasaran), metode observasi lapangan (untuk mengamati data empiris di lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan. Selain itu digunakan juga untuk melengkapi metode survey dan metode wawancara. Dengan cara inilah berbagai informasi yang lebih valid diperoleh melalui *cross check* data dan informasi dari berbagai sumber.

Monev mutu yang dilakukan selama ini selalu dibawah pengetahuan organisasi atau lembaga serta unit penjaminan mutu dari universitas berbasis Islam yang terakreditasi B dan C di Kota Medan. Secara teoritis, program monev merupakan bentuk dari evaluasi penjaminan mutu ditingkat pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pelaksanaan monev mutu dirancang dan diawasi untuk dapat menjamin mutu gelar akademik yang diberikan tetap terjaga ditingkat Fakultas dan Prodi.

Pada kenyataannya menunjukkan bahwa monev mutu sebagai pelengkap laporan borang fakultas dan prodi serta pelengkap laporan borang perguruan tinggi semata. Manfaat dan fungsi utama monev mutu dalam membangun budaya mutu di universitas berbasis Islam yang terakreditasi B dan C selama ini belum terbangun dengan baik. Bila monev dan audit sudah dilakukan, biasanya upaya tindak lanjut segera dilaksanakan. Namun hal ini masih belum dilaksanakan dengan baik. Jika sudah dilaksanakan, terbatas hanya pada pemenuhan syarat tahapan mutu di atas kertas dan tidak terjawab dalam implementasi lapangan.

Penerapan penjaminan mutu di universitas berbasis Islam merupakan gambaran umum pengelolaan pendidikan tinggi Sumatera Utara saat ini. Hal ini mengingat jumlah mahasiswa yang dibinanya juga sangat banyak bila digabungkan (UINSU, UISU, UMN dan UNIVA). Untuk keperluan itulah proses belajar mengajar harus ditingkatkan kualitasnya. Salah satu upaya yang relevan untuk itu adalah mengawal pelaksanaan monev mutu. Terkait hal ini, Hamzah dan Rahman (2002) telah mengungkapkan bahwa proses belajar-mengajar di perguruan tinggi masih perlu banyak pembenahan dan penataan. Proses pembelajaran yang ada bersifat membosankan, rutinitas, dijalankan secara mekanis/kaku, dan kehilangan nuansa pedagogis, padahal kegiatan penjaminan mutu yang dilakukan sudah dirasa cukup maksimal.

Kondisi maksimal yang dirasa ternyata belum banyak membantu peningkatan penjaminan mutu dan harus ditingkatkan terus. Kondisi saat ini merupakan wujud manajemen mutu yang belum berjalan, dana yang kurang, dan komitmen mutu yang rendah di tingkat universitas, fakultas dan prodi. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Basuki (2004) bahwa implementasi sistem penjaminan mutu pada proses pembelajaran di tingkat jurusan berjalan dan berhasil baik jika didukung oleh komitmen para pelaku, manajemen bagus dengan indikator yang diukur, dan dukungan dana yang memadai.

Pelaksanaan penjaminan mutu di universitas berbasis Islam harus memperhatikan peningkatan implementasi sistem penjaminan mutu internal khususnya monev mutu yang ada di fakultas dan prodi, meningkatkan komitmen mutu hingga terbentuknya budaya mutu, serta mengukur pelaksanaan mutu melalui monev mutu dan tindak lanjutnya. Semua kondisi yang disebutkan tadi dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan monev mutu di perguruan tinggi berbasis Islam yang terakreditasi B dan C di Kota Medan

Organisasi penjaminan mutu di tingkat fakultas dan prodi akan menjadi pelaku utama dalam mewujudkan monev mutu yang baik dan benar. Namun minimnya pemahaman dan pelatihan membuat penggerak mutu di organisasi tersebut tidak kreatif dan menunggu momen akreditasi eksternal. Selain itu kurangnya dana membuat mereka tidak berdaya dalam merancang,

mengembangkan dan memperbaiki monev mutu yang dibutuhkan. Pembuatan dokumen dan pelaksanaan dokumen ditingkat operasional hendaknya diikuti dengan tindakan evaluasi yang teratur dan benar serta tindak lanjut yang tepat. Antara organisasi mutu tingkat universitas dan fakultas serta prodi harus terjalin suatu kerjasama yang kuat dan solid agar terwujud hasil yang maksimal dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh elemen perguruan tinggi.

Perguruan tinggi yang lambat dan tidak mampu merespon perkembangan sekitar sering kali disebabkan oleh tidak berjalannya fungsi pengawasan mutunya. Fungsi pengawasan mutu dalam sistem penjaminan mutu internal yang diperintahkan dikti selama ini harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan unit pelaksana mutu disetiap tingkatannya pada sebuah perguruan tinggi. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan selama ini hanya bersifat insidental dan untuk keperluan akreditasi semata tanpa melihat fungsinya dan bukan untuk membangun budaya mutu ditingkat universitas, fakultas dan prodi.

2. Kendala pelaksanaan monev mutu

Pelaksanaan evaluasi mutu yang dijalankan selama ini sangat sederhana dan tingkat efektivitasnya juga rendah. Selain model pelaksanaan evaluasi penjaminan mutu, perlu juga diperbaharui model evaluasi penjaminan mutunya sendiri agar fungsi dan tujuan pelaksanaannya menjadi tercapai. Model evaluasi dikti yang diberikan kepada unit pelaksana mutu di perguruan tinggi tidak ada yang baku dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perguruan tinggi yang bersangkutan. Kebanyakan perguruan tinggi berbasis Islam belum memiliki model pelaksanaan monev mutu yang menjamin terkawalnya budaya mutu demi tercapainya tujuan manajemen mutu itu sendiri.

Model yang diterapkan selama ini sangat sederhana dan belum efektif dalam membangun budaya mutu bila dilihat dari indikator pembentuk modelnya. Unsur ketelibatan pimpinan dan komunikasi umpan baliknya juga masih sangat lemah disamping penggunaan metode penelitiannya yang harus selalu ditingkatkan.

Jadi kendala pelaksanaan monev mutu adalah pada komitmen pimpinan yang rendah, pemahaman dan kesadaran penggiat mutu yang rendah, dan ketiadaan model dan dana yang cukup untuk melaksanakan dan menjalankan tindak lanjutnya. Pelaksanaan monev mutu sudah sebaiknya dijadikan kegiatan rutin

yang bernilai penting bagi perbaikan sistem penjaminan mutu. Melalui monev mutu inilah dokumen inti penjaminan mutu tersebut diperbaharui dan diganti secara spesifik terkait ukuran, struktur, sumber daya, visi dan misi, sejarah, serta kepemimpinan dan lain lain. Hal ini sangat dibutuhkan untuk membentuk dokumen yang monumental di tingkat universitas, fakultas dan prodi. Dokumen ini akan menjadi bahan dasar pelaksanaan manajemen mutu internal sesuai dengan yang digambarkan dalam panduan pelaksanaan sistem penjaminan mutu mulai dari universitas sampai dengan prodi sebagaimana yang telah digambarkan oleh Lubis (2010) dan Rosmayati (2016).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa revisi dan perbaikan dokumen setiap siklus mutu tidak jelas aktivitasnya. Selain itu, pelaksanaan proses pembelajaran dan manajemen akademik belum sepenuhnya menggunakan dokumen sebagai panduan dalam beraktivitas. Sosialisasi dokumen yang minim membuat dosen, tendik dan mahasiswa tidak menjadikan mutu sebagai kebutuhan dalam aktivitas mereka sehari-hari. Semua ini ternyata berawal dari tidak terpenuhinya pelaksanaan monev mutu yang baik. Selama ini beberapa universitas berbasis Islam yang terakreditasi B dan C sebagian besar prodinya melakukan monev dengan bukti yang nyata, tetapi bukti ini belum cukup karena tidak ditemukan tindak lanjutnya yang nyata ditingkat fakultas dan prodi. .

3. Alasan tidak melakukan upaya tindaklanjut monev mutu

Pelaksanaan monev mutu pendidikan tinggi dilakukan bukan untuk sekedar mendapatkan hasilnya saja namun wajib melakukan tindaklanjut dari hasil temuan yang diperoleh. Temuan yang diperoleh inilah yang akan menentukan apakah perlu dilakukan perbaikan dokumen dan proses atau diganti sama sekali dengan yang baru. Bila upaya tindaklanjut tidak terlihat, berarti aktivitas monev mutu hanya untuk kepentingan akreditasi eksternal yang dihadapi.

Agenda monev mutu internal belum dilakukan sesuai ketentuan Dikti. Hal ini terlihat pada pemahaman yang sederhana dari pimpinan dan mahasiswa terkait pelaksanaan dan tindak lanjut dari monev mutu. Pentingnya pelaksanaan monev mutu dan kaitanya dengan audit mutu tidak diketahui oleh pimpinan dan penggiat mutu lainnya pada lembaga mutu yang ada.

Laporan evaluasi mutu terkait pelaksanaan dan kelanjutan manajemen mutu di fakultas dan prodi hanya bersifat formalitas. Hal ini disebabkan keluhan fakultas dan prodi melalui hasil evaluasi mutu belum direspon serius oleh pihak universitas. Selain itu pelaksanaan audit mutu internal tidak terlihat pergerakannya mengingat jarang dilakukan dan dibuat tindak lanjutnya.

SIMPULAN

Pendidikan tinggi berbasis Islam di provinsi Sumatera Utara sebenarnya sangat menjanjikan. Banyaknya mahasiswa yang kuliah disana serta tidak sedikitnya dana yang berputar di sana menjadikan pendidikan tinggi berbasis Islam yang terakreditasi B dan C sangat layak untuk mendapatkan pelayanan mutu yang baik. Salah satu cara untuk menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang adalah dengan melakukan monev mutu yang benar.

Pelaksanaan Manajemen Mutu Internal di sektor pembelajaran dan administrasi akademik membutuhkan monev mutu yang sesungguhnya agar mampu mengukur capaian yang sudah diperoleh. Ternyata selama ini pelaksanaannya masih menyisakan masalah yang harus diatasi di tingkat fakultas dan prodi. Mulai pelaksanaan pembuatan dokumen, pelaksanaan dokumen, komitmen mutu, serta evaluasi dan tindak lanjut kegiatan pembelajaran dan administrasi akademik yang lemah.

Tindak lanjut pelaksanaan monev mutu banyak yang tidak dilaksanakan. Padahal upaya tindak lanjut ini bermanfaat untuk perbaikan kinerja dan dokumen fakultas dan prodi. Upaya tindak lanjut tidak berjalan karena kurang efektifnya evaluasi mutu yang dilakukan fakultas dan prodi. Selain itu, kesadaran akan pembahasan hasil monev mutu belum tinggi, sehingga SOP yang telah diluncurkan tidak terbenahi bila belum tepat atau harus diganti. Upaya tindak lanjut ini penting untuk dibahas bersama antara pihak universitas, fakultas dan prodi sehingga mendapatkan hasil yang utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2015). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hergenhahn, B.R. dan Matthew H.Olson. (2012). *Theories Of Learning Pearson Education*. Jakarta: Kencana.
- Slameto. (2012). *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara.

- Hamzah & Rahman. (2002). *Peningkatan Kemampuan Mahasiswa untuk Belajar Mandiri pada Mata Kuliah Geografi melalui Penulisan Jurnal Perkuliahan*. Jurnal Ilmu Pendidikan. 9. (2) : 142-150.
- Basuki, Ari. (2004). *Implementasi Sistem Jaminan Mutu (Quality Assurance) Proses Pembelajaran Di Perguruan Tinggi*. Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan, Nomor 1, Tahun VI, 2004 : 104-113.
- Chairul P. Lubis, dkk. (2010). *Implementation of Quality Assurance for Higer Education USU experience and Program*. USU Press: Medan.
- Rosmayati, dkk. (2016). *Panduan Persiapan Dokumen Pendukung Dan Lampiran Borang Akreditasi Program Pasca Sarjana (S2&S3)*. USU Press: Medan.

